



Peranan Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Kabupaten Aceh Timur

The Role of Bappeda in Participatory Development Planning In East Aceh District

Teuku Rizam, Nina Siti Salmaniah Siregar & Isnaini*

Pasca Sarjana Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Tujuan penelitian untuk menganalisis Peranan Bappeda dalam perencanaan pembangunan partisipatif pada bidang sarana dan prasarana. Kendala Bappeda dalam perencanaan pembangunan partisipatif pada bidang sarana dan prasarana. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 5 orang. Pengumpulan data di peroleh dari wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian adalah Peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan partisipatif sarana dan prasarana, kurang baik karena kurangnya komunikasi yang aktif antara unsur Bappeda dengan unsur Instansi. Peran Bappeda dalam aspek memadukan kegiatan, berjalan dengan baik terlihat dari OPD yang memadukan kegiatan yang sejenis. Aspek mengidentifikasi keterkaitan dan kepentingan Instansi berjalan dengan baik, adanya identifikasi terhadap OPD. Peran Bappeda dalam perumusan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana sudah baik karena perencanaan yang dilakukan Bappeda bersifat makro yang di muat dalam RPJMD. Aspek evaluasi perencanaan berjalan baik, mengevaluasi dokumen-dokumen juga mengadakan Musrenbang. Aspek memberi petunjuk dan bimbingan berjalan baik, adanya pelatihan dan bimbingan yang di adakan Bappeda dalam perencanaan pembangunan. Peran Bappeda dari aspek keaktifan mengikuti rapat koordinasi sudah baik, instansi merasa rapat koordinasi merupakan hal penting bagi pembangunan.

Kata Kunci: Bappeda; Peranan; Perencanaan Pembangunan.

Abstract

The purpose of the study was to analyze the role of Bappeda in participatory development planning in the field of facilities and infrastructure. Bappeda constraints in participatory development planning in the field of facilities and infrastructure. This study used descriptive qualitative method. The sample in this study amounted to 5 people. Data collection was obtained from interviews, documentation and observation. The result of the research is that the role of Bappeda in participatory development planning of facilities and infrastructure is not good because of the lack of active communication between Bappeda elements and agencies. The role of Bappeda in the aspect of integrating activities is running well, as can be seen from the OPD that combines similar activities. Aspects of identifying the linkages and interests of the Agency are going well, there is identification of the OPD. The role of Bappeda in formulating the planning for the development of facilities and infrastructure is good because the planning carried out by Bappeda is macro in nature which is contained in the RPJMD. The planning evaluation aspect went well, evaluating the documents as well as holding a Musrenbang. Aspects of giving instructions and guidance went well, there was training and guidance held by Bappeda in development planning. The role of Bappeda from the aspect of active participation in coordination meetings is good, agencies feel that coordination meetings are important for development.

Keywords: Bappeda; Role; Development Planning.

How to Cite: Rizam, T, Siregar, N.S.S., & Isnaini. (2021). Peranan Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Kabupaten Aceh Timur. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(1) 2021: 57-64.

* Email: isnaini@staff.uma.ac.id

ISSN 2721-7507 (Online)



PENDAHULUAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah, karena lembaga inilah yang bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Bappeda adalah badan langsung yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada daerah. Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan merupakan organisasi perangkat daerah, dan keberadaannya sebagai unsur penunjang pemerintah dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Sesuai dengan Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980 tentang pembentukan Bappeda Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional tersebut maka Pemerintahan di dalam melaksanakan pembangunan di daerah, terlebih dahulu direncanakan supaya pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu maka pembentukan badan perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Aceh Timur sangat diperlukan dalam melaksanakan pembangunan secara merata dengan Otonomi yang seluas-luasnya. Badan perencanaan pembangunan daerah ini mempunyai fungsi membantu kepala daerah dalam menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya. Artinya, untuk daerah Kabupaten Aceh Timur berfungsi membantu Bupati dalam perencanaan pembangunan. Peran serta masyarakat sebagai wujud dari keseriusan masyarakat mengawal jalannya pembangunan perlu disertai dengan tersedianya ruang partisipasi publik dalam memberikan masukan-masukan yang mencerminkan aspirasi masyarakat.

Supaya pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh terarah dan terpadu, maka perlu adanya suatu perencanaan yang cukup matang yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik. Melihat begitu pentingnya peranan Bappeda tersebut sebagai badan yang turut aktif membantu bupati kepala daerah dalam Perencanaan Pembangunan daerah, maka timbul permasalahan bagi kita, sejauh mana proses pelaksanaan, tugas dan fungsi serta bagaimana peranan Bappeda Pemda Kabupaten Aceh Timur terhadap pembangunan daerah? Tentu perencanaan pembangunan daerah mestilah di sokong dengan implementasi pemerintahan daerah yang merata dan berkesinambungan dengan arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis, tentunya juga tugas pokok dan fungsi lembaga

Bappeda mustilah konsisten dengan komitmen terhadap apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sangat dipengaruhi adanya peran serta masyarakat maupun unsur-unsur dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peran serta masyarakat sebagai wujud dari keseriusan masyarakat mengawal jalannya pembangunan perlu didukung dengan tersedianya ruang partisipasi publik dalam memberikan masukan-masukan yang mencerminkan aspirasi masyarakat.

Untuk itu perlu kita ketahui apa arti dari pada tugas pokok yang sebenarnya beserta prosedur yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Supaya pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh terarah dan terpadu, maka perlu adanya suatu perencanaan yang cukup matang yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik. Dengan demikian, melihat dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana proses pelaksanaan fungsi Bappeda serta perumusan kebijakan dalam bidang perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Aceh Timur. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “Peranan Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Kabupaten Aceh Timur.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penyusunan tesis ini antara lain sebagai berikut:

1. Peranan Bappeda dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Kabupaten Aceh Timur.
2. Kendala yang di hadapi Bappeda dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Kabupaten Aceh Timur.

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan Bappeda dalam perencanaan pembangunan partisipatif di kabupaten Aceh Timur.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam perencanaan pembangunan partisipatif di kabupaten Aceh Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan teknik analisis Kualitatif dikarenakan permasalahan yang belum jelas, kompleks dan penuh makna. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya seperti mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data (Creswell 2010:5). Alasan lain penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena ingin memahami secara mendalam bagaimana peranan Bappeda dalam perencanaan pembangunan partisipatif. Serta untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala yang di hadapi Bappeda dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Kabupaten Aceh Timur.

Subjek penelitian kualitatif merupakan pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi terhadap penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian kualitatif yang dijadikan subjek penelitian sebagai sumber informasi hanyalah subjek yang dapat memberikan informasi (Nasution, 2003:32). Sumber data (subjek penelitian) yang dipilih adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah:

1. Informan kunci, yaitu Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Timur.

2. Informan utama, OPD Kabupaten Aceh Timur sebanyak 3 orang.
3. Informan tambahan, Keuchik.

Metode yang di gunakan dalam mengambil sample menggunakan Teknik sampling snowball adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang sampel, tetapi karena dengan dua orang sampel ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sampel sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak (Sugiyono, 2010:145).

Perencanaan Pembangunan

Secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan atau daerah yang bersangkutan. Sedangkan tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera. Literatur ilmiah yang tersedia memberikan beberapa pengertian tentang perencanaan pembangunan dalam bentuk berbagai definisi.

Arthur W.Lewis (1965) mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia lebih produktif.

Jensen (1995) merekomendasi bahwa perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks, sehingga prosesnya harus memperhitungkan kemampuan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya fisik, dan sumber daya lainnya (Riyadi 2002:8).

Teori Kebijakan Publik

Thomas R. Dye (1981) Kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Pengertian yang diberikan Thomas R. Dye ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Selain itu, kajiannya yang hanya terfokus pada negara sebagai pokok kajian. Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu.

Pada sudut pandang lain, Hakim (2003) mengemukakan bahwa Studi Kebijakan Publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Kegagalan tersebut adalah information failures, complex side effects, motivation failures, rentseeking, second best theory, implementation failures (Hakim, 2002).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Publik Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Pemahaman tentang kebijakan publik berhubungan dengan administrasi pembangunan, masyarakat harus memahami aturan-aturan main dalam pelaksanaan kebijakan publik pada sektor pembangunan. Yang mana pelaksanaan tersebut haruslah berpayung hukum, sehingga tidak akan muncul permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

Di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan tersebut telah dinyatakan Pasal 4 Huruf d yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan bertujuan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, Undang-Undang tersebut telah menjamin bahwa dalam setiap langkah perencanaan pembangunan baik ditingkat pusat maupun daerah partisipasi masyarakat wajib untuk didengar dan dipertimbangkan oleh pemerintah (Winarno, Budi:2007).

Peranan Bappeda dalam perencanaan pembangunan partisipatif pada bidang sarana dan prasarana.

Peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan partisipatif sarana dan prasarana di Kabupaten Aceh Timur dari aspek penyerasian jadwal kegiatan yang berada dalam kategori kurang baik karena kurangnya komunikasi yang aktif antara unsur Bappeda dengan unsur Instansi.

Peran Bappeda dalam aspek memadukan kegiatan yang sejenis dan berkaitan, sudah berjalan dengan baik terlihat dari beberapa OPD yang telah memadukan kegiatan atau program yang sejenis dan berkaitan.

Dalam aspek mengidentifikasi keterkaitan dan kepentingan Instansi sudah berjalan dengan baik dimana sudah ada identifikasi terhadap OPD.

Peran Bappeda dalam perumusan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana terlihat sudah baik karena perencanaan yang dilakukan Bappeda bersifat makro yang di muat dalam RPJMD yang kemudian di jabarkan untuk selanjutnya ditindak lanjuti oleh OPD teknis yang dalam hal ini OPD yang terlibat dalam perencanaan pembangunan sarana dan prasarana.

Aspek evaluasi perencanaan sudah berjalan baik dimana selain mengevaluasi dokumen-dokumen juga mengadakan Musrenbang serta analisis dalam melihat inkonsistensi identifikasi permasalahan sebelumnya.

Aspek memberi petunjuk dan bimbingan sudah berjalan baik dimana adanya pelatihan-pelatihan dan bimbingan yang di adakan Bappeda dalam memberikan pemahaman tentang perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Timur.

Peran Bappeda dari aspek keaktifan mengikuti rapat koordinasi juga sudah berjalan dengan baik atau sudah aktif dimana instansi merasa rapat koordinasi merupakan hal penting bagi pembangunan Kabupaten Aceh Timur. Keaktifan mengikuti rapat koordinasi dimaksudkan agar tingkat pemahaman para OPD terhadap mekanisme koordinasi perencanaan pembangunan dapat efektif sehingga terjadi keserasian program kegiatan pembangunan setiap Instansi di Kabupaten Aceh Timur.

Kendala Bappeda dalam perencanaan pembangunan partisipatif pada bidang sarana dan prasarana.

Penyesuaian atau kesiapan anggaran. Kerangka anggaran menjadi hal yang mesti diperhatikan dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan, sehingga dalam pelaksanaannya pembagian alokasi dana terhadap rancangan awal OPD yang memuat prioritas pembangunan daerah tidak terganggu. Kerangka anggaran rencana kegiatan yang perlu di biyai oleh sumber pendanaan baik itu APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN maupun sumber dana lainnya.

Usulan yang terlalu banyak. Pembangunan mengacu kepada usulan kegiatan yang ada pada Musrenbang. Setiap usulan dibahas untuk selanjutnya di tetapkan sebagai usulan kegiatan prioritas dalam penetapan kebijakan. Dalam Perencanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Timur tidak terlepas dari proses pemilihan begitu banyak usulan dari berbagai pihak-pihak yang berkepentingan maupun dari kelompok-kelompok masyarakat, namun dalam prosesnya terkadang penyaringan usulan kegiatan tersebut menjadi salah satu kendala yang cukup berarti bagi tim penyelenggara maupun pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan itu sendiri.

Keterbatasan dokumen penunjang. Dalam pelaksanaan forum Musrenbang, salah satu yang menjadi hal penunjang kegiatan agar berjalan lancar adalah kelengkapan forum itu sendiri, baik itu peserta, narasumber kegiatan, serta dokumen-dokumen penunjang lainnya. Seperti pada sebagian besar forum Musyawarah perencanaan pembangunan yang diadakan di Kabupaten Aceh Timur, hal yang menjadi kekurangan dan permasalahannya yaitu kurangnya dokumen-dokumen acara seperti misalnya pada forum Musrenbang Gampong, pengadaan daftar permasalahan dan tantangan Gampong, peta kemiskinan dan pengangguran, serta hasil pelaksanaan pembangunan Gampong pada tahun sebelumnya.

SIMPULAN

Peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan partisipatif sarana dan prasarana, kurang baik karena kurangnya komunikasi yang aktif antara unsur Bappeda dengan unsur Instansi. Peran Bappeda dalam aspek memadukan kegiatan, berjalan dengan baik terlihat dari OPD yang memadukan kegiatan yang sejenis. Aspek mengidentifikasi keterkaitan dan kepentingan Instansi berjalan dengan baik, adanya identifikasi terhadap OPD. Peran Bappeda dalam perumusan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana sudah baik karena perencanaan yang dilakukan Bappeda bersifat makro yang di muat dalam RPJMD. Aspek evaluasi perencanaan berjalan baik, mengevaluasi dokumen-dokumen juga mengadakan Musrenbang. Aspek memberi petunjuk dan bimbingan berjalan baik, adanya pelatihan dan bimbingan yang di adakan Bappeda dalam perencanaan pembangunan. Peran Bappeda dari aspek keaktifan mengikuti rapat koordinasi sudah baik, instansi merasa rapat koordinasi merupakan hal penting bagi pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, Abe. Perencanaan Daerah Memperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Angkat, K.M., Kadir, A., & Isnaini. (2016), Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal : Public Administration Journal*, 7 (1): 33-48
- Auza, A. (2019). Pengaruh Komunikasi Nonverbal dalam mewujudkan Komunikasi yang Efektif antara Agen dan konsumen PT. Axa Financial Indonesia cabang Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 1 (3): 156-161.
- Batubara, B.M., (2013). Hubungan Komunikasi Badan Perwakilan Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 1 (1): 76-87.
- Dr. H. Siswanto Sunarno, S.H., M.H. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Sinar Grafika : Jakarta. 2008.
- Dunn.William. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gajah Mada Universal Press : Yogyakarta. 2003.
- Edmund M, Burke. Sebuah Pendekatan Partisipasi Dalam Perencanaan Kota : Yayasan Sugijanto Soegijoko, 2004.
- Hamdi, Muchlis. Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2014.
- HAW. Widjaja. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2002.
- <http://gerryprotokol.wordpress.com/2011/01/05/-perencanaan-pembangunan-daerah>. (di akses pada tanggal 3 Februari 2019. 15:45 WIB)
- <http://pkmk-lanri.org/2013/02/18/pengembangan-perencanaan-dalam-perumusan-kebijakan-publik>. (di akses pada tanggal 10 Februari 2019. 11:55 WIB)
- <http://wazni.staff.unri.ac.id/pemerintahan-daerah-dilihat-dari-beberapa-aspek>. (di akses pada tanggal 8 Februari 2019. 20:50 WIB)
- Islamy, M. Irfan. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Kadir, A. (2018). Analisis Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan sebagai Upaya Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 1 (1): 9-15.
- Kadir, A., (2013). Peranan Partai Politik dalam Menanggulangi Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Legislatif 2009, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 1 (1): 65-75.
- Karianga, Hendra. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Perspektif Hukum dan Demokrasi, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Kountor, D.M.S, Ronny. Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi & Tesis : PPM, 2003.
- Kriyantono, Rachmat. Teknik Praktis Riset Komunikasi, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mulyana, Dedy. Teknik Praktis Riset Komunikasi, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Nugroho, D Riant. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : Gramedia, 2004.
- Otonomi Daerah. Yogyakarta, Lapera Pustaka Utama, 2001.
- Pasi, N., Kadir, A., & Isnaini. (2016), Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Dairi, *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal : Public Administration Journal*, 7 (1): 49-63
- Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur.
- Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
- Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah.
- Pinayungan, J. Kusmanto, H. & Isnaini. (2018). Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal : Public Administration Journal*. 8 (1): 108-123.
- Prof. H. Rozali Abdullah, S.H. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Rajawali Pers, Jakarta : 2011.

- Siregar, N.S.S., (2013), Persepsi Orang Tua terhadap Pentingnya Pendidikan bagi Anak, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 1 (1): 11-27.
- Sitompul, M., & Lubis, A.A. (2013), Analisis Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai Modal Pembangunan, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 1 (1): 1-10.
- Sjafrizal, Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Subarsono, AG. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.
- Suharyanto, A. Harianja, R.S.H.K. Ndraha, P.W. Saragih, I.S.K. Sipayung, K.F. Harahap, N. & Nababan, R. D. (2019). Indigenous Knowledge Masyarakat Etnis Karo Terhadap Pengelolaan Tumbuhan Hutan Di Desa Lingga, Kabupaten Karo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 1 (3): 162-169.
- Sunarno. Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses & Analisis Kebijakan, Yogyakarta : UNY, 2010.
- Supriady, Britakusumah Riyadi Deddy. Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah : PT. GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA, 2003.
- Suyanto, Bagong. Metode Penelitian Sosial, Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2005.
- Syafrizaldi. (2018). Hubungan Konsep Diri dengan Minat Wirausaha pada Mahasiswa Universitas Medan Area. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 1 (2): 75-80.
- Tangkilisan, Hesel, Nogi. Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan, Analisis, dan Trasformasi Pemikiran. Yogyakarta : Balairung, 2003.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Widjaja, HAW. Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia dalam rangka sosialisasi UU.No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2008.
- Winarno, Budi. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Penerbit Media Pressindo, 2002.